

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE**

Oleh :
Siti Indah Dhiyavani
Pembimbing : Azwir Nasir dan Sem Paulus

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : indahtintin19@gmail.com

*The influence Local Government Officials Performance, Local Financial Management,
Internal Control System, and Government Accounting Standard
Implementation to The Good Governance Implementation*

ABSTRACT

The research aims to examine the influence local government officials performance, local financial management, internal control system, and government accounting standard implementation to the good governance implementation. Object of this research is local government unit at medium region Pekanbaru. Every each local government unit, this research only need three respondents. There are one hundred twentynine questionnaires were sent, but only ninety questionnaires are returned. That data are analyzed by multiple regression method. The variables were examined are influence of local government officials performance, local financial management, internal control system, and government accounting standard implementation to the good governance implementation. The results of this research showed that local government officials performance has an effect to the good governance implementation with 0,045 significant value, local financial management has an effect to the good governance with 0,04 significant value, and government accounting standard implementation variable has an effect to the good governance implementation with 0,000 significant value. But internal control system variable has not an effect to the good governance implementation with te counting table 0,151. The coefficient determinant of this result showed that only 62,8% independent variables can examined the dependent variable and 37,2% from other independent variable.

Keywords : Local Government Officials Performance, Financial Management, Internal Control System, Government Accounting Standard, and Good Governance Implementation

PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah yang merubah perilaku pemerintah untuk lebih efisien dan profesional, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (Mardiasmo, 2002). Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi

berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan penting terhadap penetapan aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan terhadap penggunaan sumber daya kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata.

Implementasi tujuan tersebut masih belum terealisasi dengan baik, dikarenakan munculnya berbagai

masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih belum dapat dicegah oleh penegak hukum, dan monopoli dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan publik terhadap kualitasnya yang kian memburuk.

Penyelenggaraan pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini, dimasa lalu negara ataupun pemerintah sangat dominan, karena masyarakat dijadikan pihak yang selalu diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar.

Good governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan pemerintah yang mengimplementasikan *good governance* dapat diwujudkan jika manajemen penyelenggaraan pemerintah atau kinerja aparatur pemerintah yang baik dan handal meliputi manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakteristik *good governance* dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*. Salah satu cara untuk membentuk dan meningkatkan produktivitas menuju pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem manajemen kinerja (Sedarmayanti,2012).

Secara teori *good governance* menekankan pada proses pengelolaan pemerintah dengan adanya *stakeholders* yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta juga ikut

terlibat dalam mendayagunakan sumber daya yang ada meliputi alam dan manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing.

Dengan diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaan. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut menunjukkan penerapan salah satu prinsip *good governance* (Suprayogi,2010).

Peningkatan kinerja merupakan salah satu dasar dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (Bastian,2001). Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran / tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah tersebut.

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan selain diukur dengan persepektif kinerja juga dapat diukur dengan melihat persepektif pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat maka dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan. Sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu organisasi

pemerintahan juga memerlukan adanya sistem pengendalian intern yang baru.

Sistem pengendalian pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang sudah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan didalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan kinerja pemerintah serta adanya peningkatan kualitas melalui implementasi lima elemen pengendalian intern yang dijelaskan pada PP No.60 tahun 2008 yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Peran implementasi standar akuntansi pemerintah didalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik terdapat didalam kategori penyusunan laporan keuangan. Untuk menggambarkan kualitas informasi keuangan, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Hal tersebut akan berdampak pada pemberian opini, yang akan mengakibatkan penilaian yang dilakukan oleh BPK sebagai badan profesional yang independen terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Apabila penyusunan laporan keuangan tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku, maka informasi yang disajikan akan tidak reliabel dan andal, sehingga berdampak pada penilaian secara keseluruhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini diperoleh dari survey Indonesia Index Governance tahun 2014 yang disampaikan oleh Gatot Darsmanto yang merupakan Deputi Kepala BPKP bidang Akuntan Negara yang diadakan oleh biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam Riau menyatakan bahwa Kota Pekanbaru tidak masuk pada urutan 20 besar daerah yang memiliki *good governance* di Indonesia.

Penyebab tidak dapat terwujudnya *good governance* dikarenakan minimnya sistem pengendalian intern, pemborosan keuangan daerah, yang mencapai Rp. 25triliyun, kinerja aparatur yang tidak efektif karena minimnya koordinasi dan kewenangan yang ada serta ketidakkeekonomian pada hal keuangan daerah, berita ini dilansir oleh Gatot hari selasa (13/10/2015, Riau online.co.id).

Jadi dapat dijelaskan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan implementasi standar akuntansi pemerintah serta fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru akan saling bersinergi dan saling melaksanakan peranannya masing-masing maka akan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah Kinerja Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* ? 2) Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* ? 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* ? 4) Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance*, 2) Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* , 3) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Governance*, 4) Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Penerapan *Good Governance*

Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke-delapan dari *Good Governance* adalah membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Bastian, 2010).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi, yang dimaksud dengan pengelolaan

keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaiakan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai,2002).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut pemerintah yang dikemukakan pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Kinerja aparatur pemerintah (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Bastian, 2010:320). Reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan untuk membangun aparatur negara yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan adanya peningkatan kinerja aparatur karena pembangunan aparatur mampu meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Keberhasilan/kegagalan suatu organisasi dapat diketahui dengan mencatat dan mengukur seluruh aktivitas organisasi. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program. Tetapi juga ada keluaran/ manfaat dari program tersebut (Bastian, 2010:329). Kriteria keberhasilan kinerja berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga ada keluaran (manfaat) dari program tersebut (Ruspina, 2013).

Menurut Ruspina (2013), *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* merupakan muara dari pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga kinerja dari pihak yang melayani (aparatur pemerintah) mempengaruhi terselenggaranya *good governance*.

Oleh sebab itu, kinerja menjadi isu sentral terkait dengan *good governance*. Kinerja pemerintah selalu terkait erat dengan perilaku kerja aparatur karena perilaku tersebut merupakan tindakan yang akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan. Menurut penelitian Ruspina (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja aparatur pemerintah daerah dengan penerapan *good governance*.

Semakin baik kinerja aparatur pemerintah daerah, maka akan semakin baik *good governance* yang diterapkan. Kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif, dan adaptif dapat menghasilkan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H1: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Governance*

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama

sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkai dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

Good governance diartikan sebagai muara dari pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga kinerja dari pihak yang melayani (aparatur pemerintah) mempengaruhi terselenggaranya *good governance*. Pola-pola pemerintahan yang tidak sesuai bagi tatanan masyarakat yang telah berubah membutuhkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan administrasi publik. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (Halim dan Damayanti, 2007). Halim (2007) mengatakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran.

Salah satu aspek dari pemerintahan yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya

porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Penerapan *good governance* bagi pemerintah merupakan hal yang selalu ditekankan sejak memasuki era reformasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyawanti (2012) hubungan sistem pengelolaan keuangan mempengaruhi *good governance* yang dilihat dari persepektif sistem dan pengakuan akuntansi serta anggaran daerah.

Sehingga dapat disimpulkan, jika pengelolaan keuangan daerah dapat membantu menciptakan *good governance* yang berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tataannya tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Winarno, 2002:53).

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik yaitu responsivitas (*responsivities*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H2: Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penerapan Good Governance

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Governance

IAPI (Agoes, 2012) mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih belum terlaksana di Indonesia. Jika dilihat dari sisi akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *good governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Menurut Setyawan (2004) mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah cara-cara dimana individu dan institusi baik private maupun publik mengelola urusannya bersama-sama. Pengendalian

internal merupakan unsur yang tidak dapat terlepas dari *good governance*. Hal ini dialami oleh seluruh pemerintah di Indonesia. Jika sistem pengendalian internal pemerintah tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh Habibie (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Semakin baik pengendalian internal, maka semakin baik pula *good governance*. Hal tersebut berarti dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan terciptanya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Sari (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H3: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan Good Governance

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Bastian (2010), dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi merupakan pedoman umum yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar

akuntansi pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Selain itu standar akuntansi pemerintah juga memastikan bahwa aparatur pemerintah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan dilengkapi dengan objektivitas informasi yang disajikan. Standar akuntansi pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. *Good governance* adalah kaitan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tataannya tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Winarno, 2002:53). Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yakni masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pemerintahan itu sendiri.

LKPD harus disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah (UU NO.1 Tahun 2004). Standar akuntansi yang digunakan mengikuti PP No.71 Tahun 2010, sehingga dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan pemerintah dapat

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan *good governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*, hal ini diwujudkan melalui ketaatan aparatur pemerintah dalam menaati standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dengan adanya implementasi standar akuntansi pemerintah, maka akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku untuk mewujudkan akuntabilitas yang merupakan unsur *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H4: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Governance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kota Pekanbaru. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Kabag Humas. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 129 responden. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian Susanti Widyawati (2012). Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yang bekerja pada SKPD di Kota Pekanbaru.

**Metode Analisis Data
Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuisiioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrument penelitian dilakukan dengan melihat konsistensi koefisien cronbach alpha untuk semua variabel. Menurut Ghozali (2013), instrument penelitian dapat dikatakan handal (*reliable*) jika *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2013) uji normalitas juga berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari α 5%.

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2013). Uji multikolonearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonearitas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Data

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

a = konstanta
 b1, b2, b3, b4 = koefisien regresi
 X1 = Kinerja Aparatur Pemerintah
 X2 = Pengelolaan Keuangan Daerah
 X3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 X4 = Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
 Y = Penerapan *Good Governance*
 e = Standar Error

Pengujian Hipotesis

Menurut Ghazali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013).

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas

Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Keseluruhan variabel penelitian ini terdiri dari 27 item pernyataan dinyatakan valid. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, suatu model dikatakan valid jika tingkat

signifikansinya di bawah 0,05 untuk setiap butir pernyataan.

Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:71) dengan kriteria *Cronbach Alpha* > 0,6. Konstruk (variabel) memiliki reliabilitas.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Y	0,688
X1	0,776
X2	0,687
X3	0,605
X4	0,754

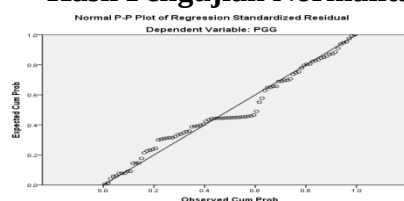
Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini disajikan dalam grafik P-Plot.

Gambar 1
Hasil Pengujian Normalitas



Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multikolonieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai dari *tolerance*

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolonieritas

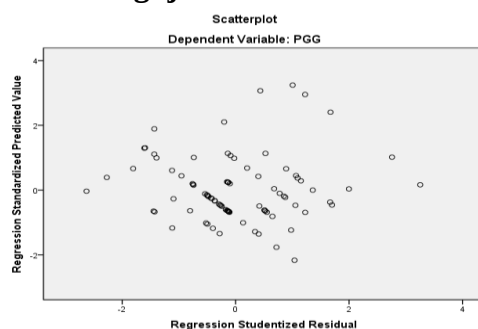
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kinerja Aparatur Pemerintah	.832	1.202
Pengelolaan Keuangan Daerah	.713	1.402
Sistem Pengendalian Interna	.956	1.046
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.800	1.250

Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen.

Gambar 2
Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 6,710 + 0,196X_1 + 0,239X_2 - 0,013X_3 + 0,377X_4 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (α) sebesar 6,710. Artinya adalah apabila variabel kinerja aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan implementasi standar akuntansi pemerintah diasumsikan nol (0), maka penerapan *good governance* sebesar 6,710.
- Nilai koefisien regresi kinerja aparatur pemerintah sebesar 0,196. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerapan *good governance* sebesar 0,196.
- Nilai koefisien regresi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,239. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerapan *good governance* sebesar 0,239.
- Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar - 0,013. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan maka akan menurunkan penerapan *good governance* sebesar 0,013.
- Nilai koefisien regresi implementasi standar akuntansi pemerintah sebesar 0,377. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerapan *good governance* sebesar 0,377.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan didapat nilai t_{hitung} senilai 2,032. Nilai t tabel sebesar 1,987,

diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 86 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,032 > t_{tabel} 1,987$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Sementara itu, didapat P value 0,045 yang berarti P value $0,045 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan didapat nilai t_{hitung} senilai 2,907. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,907 > t_{tabel} 1,987$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Sementara itu, didapat P value 0,040 yang berarti P value $0,040 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan didapat nilai t_{hitung} senilai -0,151. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} -0,151 < t_{tabel} 1,987$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Maka dapat disimpulkan **H₃ ditolak** yaitu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan didapat nilai t_{hitung} senilai 4,105. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4,105 > t_{tabel} 1,987$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Maka dapat disimpulkan **H₄ diterima** yaitu implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Sementara itu, didapat P value 0,000 yang berarti P value $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien *adjusted R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,628 yang artinya adalah 62,8% variabel dependen (penerapan *good governance*) dijelaskan oleh variabel independen (kinerja aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan implementasi standar akuntansi pemerintah), dan sisanya sebesar 37,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya akan mempengaruhi penerapan *good governance*.

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti keuangan yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar penilaian penerapan *good governance*.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti SKPD Kota Pekanbaru belum memenuhi sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai sehingga tidak mempengaruhi penerapan *good governance*.
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah membantu pemerintah mempengaruhi penerapan *good governance*.

Saran

Atas dasar simpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, yaitu tidak meneliti pada SKPD yang sama, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Provinsi Riau, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance*, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel *total quality management* dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
3. Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- Domai. 2002. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Telaah Akuntansi Sektor Publik*.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate*

dengan Program
SPSS.Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Habibie. 2013. *Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Solok)*. Skripsi. UNP. Padang
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah
- Mardiasmo. 2002a. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ruspina, Depi Oktia. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang)*. Skripsi. UNP. Padang
- Sari, Diana. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,*

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip- Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Palembang

- Sedarmayanti. 2012. *Good Governnce (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Suprayogi, Angga. 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)*, Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung
- Widyawati, Susanti. 2012. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Mataram)*. Surabaya